TUGAS FILSAFAT MANUSIA
ANALISIS KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN PASAR BAQA

Dosen Pengampu : DR. AGUSTINUS W. DEWANTARA, S.S., M.HUM

Disusun Oleh:

Velera Eucharis Shemanandi (3803019033)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
KAMPUS MADIUN

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaanNya, paper ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Manusia mengenai realitas hidup sehari-hari yang disoroti dari aneka teori Filsafat Manusia. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun makalah ini.

Saya berharap semoga paper ini dapat menambah pengetahuan para pembaca. Namun tidak lepas dari semua itu, saya menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam makalah saya ini. Oleh karena itu saya memohon pembaca untuk memberikan kritik dan saran agar saya dapat menulis makalah yang lebih baik lagi pada makalah selanjutnya.

Madiun, 14 November 2019

Penyusun

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu tindakan menyalahgunakan, menyelewengkan atau tidak menggunakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang dengan baik demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Korupsi ini dapat dilakukan oleh beberapa oknum tertentu sekaligus. Dalam paper ini, saya membahas tentang sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh Sulaiman Sade atas pembangunan pasar baqa, Samarinda. Tujuan penulisan paper ini adalah untuk memaparkan tentang tindak pidana korupsi oleh Sulaiman Sade dilihat dari sudut pandang tindakan manusia. Teori yang digunakan dalam pembahasan paper ini yaitu: tindakan manusia *actus hominis* dan *actus humanus*, azas tahu mau bebas, prinsip hati nurani manusia, dan prinsip reflektif *bonum communae bono privato prefaerri debet*.

Kata kunci : tindak korupsi, tindakan manusia, *actus hominis* dan *actus humanus*, azas tahu mau bebas, prinsip hati nurani manusia, dan prinsip reflektif *bonum communae bono privato prefaerri debet*.

KASUS KORUPSI

PEMBANGUNAN PASAR BAQA, SAMARINDA

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan suatu tindakan menyelewengkan atau tidak menggunakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang dengan baik demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

Berdasarkan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri dan korporasi, menyalahgunakan wewenang suatu jabatan yang mengakibatkan kerugian bagi ekonomi dan keuangan negara.

Selama ini, korupsi merupakan kejahatan yang deringkali dianggap enteng oleh pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan tertentu. Tanpa bisa dipungkiri, korupsi di Indonesia memang sudah terbilang sangat parah, sehingga memaksa pemerintah untuk membentuk suatu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tingkat korupsi di Indonesia sudah termasuk tinggi setiap tahunnya, mulai dari pejabat kota, provinsi maupun negara. Hal ini sangat memprihatinkan. Pejabat yang seharusnya mengayomi masyarakat malah tidak memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya.

Korupsi juga menimbulkan dampak yang kurang baik karena korupsi membuat rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi berkurang. Tentu saja korupsi juga mengakibatkan utang negara menjadi semakin banyak. Selain itu, masyarakat miskin akan menjadi semakin miskin karena uang yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat malah membuat perut pejabat menjadi buncit.

Korupsi yang menjadi jadi mencerminkan etika social politik, karena ketika seorang pejabat melakukan korupsi, maka pejabat lain yang terkait korupsi akan melindungi dengan tak tik politiknya agar mereka tidak terjat, lalu masuk penjara bersama. Bahkan hukum pun seakan akan menyelamatkan koruptor dan kurang tegas menghadapi tikus-tikus berdasi tersebut.

B. Studi Kasus

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, Sulaiman Sade resmi mendekam di Rutan Klas II A Sempaja terkait dengan tindak pidana korupsi.

Terdapat tiga tersangka yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Samarinda, diantaranya SS, Mf dan Sd. Ketiganya mulai menjalani tahanan sejak hari ini, Selasa (8/10/2019) hingga 20 hari ke depan, yang akan dilanjutkan dengan proses persidangan atas kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Baqa, Samarinda Seberang. Tampak ketiganya, satu per satu ke luar dari gedung Kejari menggunakan rompi oranye menuju bus tahanan yang dilanjutkan perjalanan ke Rutan.

"Proses indikasi pidana korupsi pembangunan Pasar Baqa memang berjalan panjang. Sedangkan penyidikannya dimulai dari 2018," ucap Kasi Pidsus Kejari Samarinda, Zainal Efendi, Selasa (8/10/2019).

Pembangunan Pasar Baqa berdasarkan tahun anggaran 2014-2015 dengan nilai proyek sebesar Rp 17 miliar. Saat itu Sulaiman Sade merupakan Kepala Dinas Pasar Kota Samarinda, bertindak selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Sedangkan Mf merupakan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sd sebagai kontraktor.

Nilai kerugian negara dari aktivitas terlarang itu mencapai Rp 2 miliar. Bahkan nilai tersebut dapat bertambah. Seperti di antaranya kekuatan beton, jumlah tiang pancang dan komponen lainnya.

"Tim teknis ahli dari UGM (Universitas Gadjah Mada) telah lakukan pemeriksaan fisik di lokasi pembangunan. Terdapat beberapa volume spek dikontrak kurang, beberapa item tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)," jelasnya.

"Tim teknis ahli telah kirim berita acara ke kami, lalu kami kirim ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk audit kerugian negara," sambungnya.

Sulaiman Sade sebagai KPA memberikan peluang terjadinya kerugian negara.

Bahkan dari hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan), pihaknya menyimpulkan yang bersangkutan turut serta menikmati hasil dari pengurangan volume komponen pembangunan gedung pasar Baqa.

Pemanggilan terhadap ketiganya telah dilakukan sejak Kamis (3/10/2019) lalu. Sekitar pukul 09.00 Wita, ketiganya datang ke Kejari dan langsung dilakukan penahanan. "Panggilan pertama, ketiganya kooperatif," imbuhnya.

Terkait dengan tuntutan, pihaknya juga akan mempertimbangkan itikad baik dari para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara.

Pasal yang disangkakan kepada ketiganya yakni, Pasal 2 dan 3 Jo Pasal 55 dan JO 18, dengan ancaman kurungan Pasal 2 minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, serta Pasal 3 maksimal 20 tahun.

Artikel ini telah tayang di [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com) dengan judul Kepala BPBD Samarinda Sulaiman Sade Ditahan, Diduga Terkait Korupsi Pembangunan Pasar Baqa, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/08/kepala-bpbd-samarinda-sulaiman-sade-ditahan-diduga-terkait-korupsi-pembangunan-pasar-baqa>.

Editor: Dewi Agustina

C. Landasan Teori

1. Teori Tindakan Manusia

a. Actus Hominis

Tindakan manusia tampil sebagai suatu gerakan belaka, yang berada pada level paling rendah yaitu level vegetative (level tindakan yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang gerakannya ditentukan oleh desakan natural). Actus hominis adalah tindakan yang dimiliki manusia berupa makan, minum, tidur, berlari, dan seterusnya. Dalam tindakan yang demikian, manusia jelas tidak menggunakan rasioanalitasnya. Bahkan, manusia tidak sadar tentang apa yang dilakukannya. Dalam taraf ini tampak bahwa tindakan manusia tidak berbeda dengan tingkah laku yang dimiliki oleh binatang. Bahkan manusia bertindak sama persis seperti binatang. Dalam kasus

semacam ini, manusia tidak mengedepankan kemanusiaannya dalam bertindak. Sehingga, penilaian etis tidak dapat dikenakan kepadanya (manusia).

b. Actus Humanus

Tindakan manusia disebut *actus humanus* apabila eksistensinya sebagai makhluk rasional tercetus secara meyakinkan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang dianugerahi akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. *Actus humanus* adalah syarat perbuatan moral. Dengan arti, perbuatan moral adalah perbuatan itu berada dalam bingkai konteks penilaian baik/buruk dan terpuji/tercela. Selain itu, perbuatan moral artinya perbuatan itu ada dalam konteks kebebasan dan tanggung jawab manusia. Dalam proses *actus humanus*, manusia tidak hanya merefleksikan perihal melakukan tindakan, melainkan juga memikirkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Jadi, terdapat proses refleksi-aksi-evaluasi. *Actus humanus* menegaskan perbedaan manusia dengan makhluk hidup yang lain karena yang membedakan secara sangat mendasar manusia dengan makhluk hidup yang lain adalah rasionalitasnya.

c. Azas Tahu, Mau, Bebas

Actus humanus identic dengan *free act* (tindakan bebas). Kebebasan mengandaikan dua hal, yaitu: tahu, dan mau. Artinya, apabila manusia mengetahui dan menghendaki, ia disebut sebagai manusia bebas, dan dengan demikian ia bertanggung jawab atasnya. Apabila kehilangan salah satu dari syarat ini, maka manusia tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.

2. Hati Nurani Tumpul

Hati nurani adalah kapasitas yang dimiliki manusia untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Hati nurani memberi pertimbangan agar bertindak baik. Dalam kasus ini, saya menggunakan teori hati nurani tumpul. Hati nurani tumpul adalah hati nurani yang kurang peka terhadap nilai kebenaran sehingga lama kelamaan, kesetiannya pada hati nurani

menjadi tumpul. Hati nurani tumpul disebabkan oleh adanya sifat materialisme, sekularisme, konsumerisme, dan hedonisme.

3. Prinsip-prinsip Refleksif Dari Hati Nurani Yang Benar

Dari 14 prinsip hati nurani yang tertulis dalam buku filsafat moral, saya menggunakan satu prinsip, yaitu *Bonum communae bono privato praeferri debet* yang artinya kepentingan umum lebih penting/harus selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi.

D. Pembahasan

Masalah korupsi di Indonesia saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Bukan hanya hal-hal yang besar saja yang menjadi objek korupsi, bahkan hal-hal kecil pun memiliki peluang munculnya korupsi. Pada kasus ini, saya akan membahas satu masalah korupsi yang ada di Indonesia yaitu korupsi oleh kepala BPBD Samarinda (Sulaiman Sade) terkait korupsi pembangunan pasar baqa.

Hal ini tentunya membuat banyak warga masyarakat cemas dan resah. Hal ini juga pasti menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang dan menurun. Pihak yang diberi tanggung jawab malah menyelewengkan dana untuk kepentingan pribadi mereka. Dengan bertambahnya korupsi, maka bertambah pula kekecewaan masyarakat.

1. Teori *actus hominis* dan *actus humanus*.

Teori ini menyatakan dan menjelaskan persamaan dan perbedaan yang ada pada manusia dan binatang. Hal yang dijadikan sebagai pembeda antara manusia dan binatang adalah akal budinya. Binatang diciptakan oleh Tuhan tanpa akal budi. Sedangkan manusia diberi kelebihan yaitu akal budi sehingga dapat berpikir dengan rasional.

Berdasarkan teori ini, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sulaiman Sade ini tidak mencerminkan bahwa manusia berpikir secara rasional karena tindakannya yang tidak dilakukan dengan semestinya sesuai akal budi yang dimilikinya. Bahkan, mungkin ia tidak

menggunakan akal budinya ketika melakukan tindak korupsi tersebut. Atau mungkin juga akal budi yang dimilikinya tidak berfungsi dengan baik. Lalu, apakah pelaku korupsi dapat disebut manusia? Ataukah ia sama seperti binatang? Jika sama, lalu apakah yang menjadi persamaan pelaku korupsi dengan binatang? Salah satu contohnya adalah tikus. Tikus suka mencuri makanan. Sedangkan koruptor mencuri uang untuk beli makan. Dengan demikian, koruptor dan binatang tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kasus korupsi tersebut telah menunjukkan bahwa tindakan Sulaiman Sade tidak menunjukkan sikap kemanusiaan yang seharusnya dimilikinya. Ia hanya mementingkan kepentingan pribadinya, mendahulukan ego diri sendiri agar membuat dirinya menjadi kaya.

Azas tahu, mau, bebas

Selanjutnya, ketika seorang manusia telah mengetahui suatu tindakan, lalu ia menginginkan dan menghendaki tindakan tersebut, maka disitulah manusia disebut dengan manusia bebas, dimana dia juga harus bertanggung jawab atasnya.

Pada kasus ini, tentunya Sulaiman Sade telah mengetahui bahwa korupsi merupakan tindakan yang salah dan tidak sesuai dengan hukum agama maupun negara. Ketika ia telah mengetahui bahwa korupsi merupakan perbuatan yang salah, ia masih memiliki 2 pilihan yaitu melakukan atau tidak melakukan. Akan tetapi, ketika ia mengetahui bahwa korupsi hal yang salah bukannya menghindari, ia malah menghendaki dan melakukan tindak korupsi. Itu artinya, ia telah melakukan korupsi dengan cara direct (sadar/menghendaki).

Sulaiman Sade telah mengetahui bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk, dan ia telah menghendaki perbuatan tersebut. itu berarti Sulaiman Sade merupakan manusia bebas. Tetapi ingat, ia harus bertanggung jawab atasnya. Pada kasus ini, Sulaiman harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2Milyar dan juga hukuman penjara 3-20 tahun.

2. Hati nurani yang tumpul

Dalam hal ini, manusia memiliki kapasitas untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk. Hati nurani dapat memberikan pertimbangan pada manusia agar bertindak baik. Akan tetapi dalam konsep hati nurani yang tumpul ini, manusia kurang peka terhadap hati nuraninya sendiri dan terhadap nilai-nilai kebenaran yang ada sehingga membuat manusia mengabaikan hatinya dan tidak melakukan tindakan baik kemudian membuat hati nuraninya menjadi tumpul.

Dalam kasus korupsi Sulaiman Sade ini, saya menyebut hati nurani yang dimiliki oleh Sulaiman Sade ini telah tumpul karena adanya beberapa hal. Pertama, sikap materialisme yaitu segala sesuatu yang benar adalah materi. Jadi di dalam hidupnya, ia selalu mengejar kebutuhan materi. Tidak peduli bagaimana caranya, ia tetap mengutamakan kebutuhan materi sehingga mendorong Sulaiman Sade ini melakukan tindak korupsi untuk memenuhi kebutuhan materinya. Yang kedua adalah konsumerisme yaitu paham yang membuat seseorang melakukan konsumsi secara berlebihan atau tidak sepatutnya dengan sadar dan berkelanjutan. Hal ini juga mungkin menjadi penyebab Sulaiman Sade melakukan korupsi. Secara sadar maupun tidak sadar, kegiatan konsumsinya menjadi berlebihan karena merasa dia adalah pejabat yang mampu. Sehingga kebutuhan konsumsi yang semakin meningkat membuatnya melakukan tindak korupsi. Yang ketiga adalah hedonisme yaitu paham yang menganggap kenikmatan dan kesenangan duniawi adalah yang penting dan utama. Mungkin pada hal ini, Sulaiman Sade juga memiliki sikap hedonisme sehingga membuat Sulaiman Sade mengejar kenikmatan dan rela melakukan korupsi demi dapat menikmati uang hasil korupsinya tersebut.

Dalam prinsip hati nurani tumpul ini, manusia kerap menomorsatukan hal-hal yang bersifat duniawi bahkan kadang hingga rela melakukan segala cara dan mengabaikan kebikan hati nurani demi mengejar kenikmatan duniawi sehingga pelan-pelan hati dan kebenaran yang sejati dalam hidup menjadi tersisihkan.

3. Prinsip-prinsip Refleksif Dari Hati Nurani Yang Benar

Dalam prinsip-prinsip hati nurani yang benar ini, sebenarnya terdapat banyak prinsip yang dapat digunakan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi dalam kasus korupsi Sulaiman Sade ini, saya menggunakan prinsip *bonum communae bono privato praefferi*. Sebenarnya jika diartikan, prinsip ini seharusnya sudah sangar familiar dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang sangat tidak bisa hidup tanpa orang lain.

Dalam Bahasa Indonesia, *bonum communae bono privato praefferi debet* ini berarti kepentingan umum lebih penting/harus selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Prinsip ini menjelaskan dan menekankan kepada kita sebagai manusia yang seharusnya hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Setiap manusia pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Akan tetapi seringkali masih banyak orang yang tetap saja mementingkan kepentingan pribadinya. Dalam kasus ini, Sulaiman Sade telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip *bonum communae bono privato praefferi debet*.

Karena pada dasarnya, korupsi tidak ada bedanya dengan mencuri. Apalagi dalam kasus ini, Sulaiman Sade melakukan tindak korupsi terhadap pembangunan pasar baqa, dimana pasar tersebut merupakan kepentingan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya. Telah jelas bahwa Sulaiman Sade tidak mementingkan kepentingan masyarakat banyak, tetapi mementingkan kepentingan ego pribadinya sendiri. Meskipun bila ternyata rakyat tidak merasa dirugikan, namun dibalik perbuatannya tersebut tetap ada pihak yang dirugikan, yaitu pemerintah. Anggaran pembangunan yang seharusnya disalurkan dan digunakan untuk membangun pasar baqa malah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Kita telah tahu bahwa korupsi merupakan perbuatan yang jahat, yang tidak sesuai dengan prinsip *bonum communae bono privato praefferi debet*. Sehingga, seharusnya Sulaiman Sade tidak mendahulukan egonya dan membuat beberapa pihak menjadi rugi.

4. Opini Penulis

Pada dasarnya, korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, melanggar hukum, nilai, dan aturan lainnya. Korupsi tidak sesuai dengan kaidah agama maupun hukum negara yang ada. Dengan adanya kasus korupsi yang semakin merajalela di Indonesia ini, membuat kepercayaan masyarakat terhadap negara maupun pejabat yang ada menjadi berkurang.

Kasus korupsi harus benar-benar diperhatikan dan diberantas oleh pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan social yang begitu tinggi di Indonesia, agar rakyat miskin tidak semakin miskin dan rakyat kalangan atas tidak semakin kaya dengan dosa. Apalagi, seperti yang tertulis dalam undang-undang bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana yang hukum yang seharusnya ditegakkan dengan adil, bukan malah tajam kebawah dan tumpul ke atas. Tingginya tindak korupsi ini telah menjadi PR bagi pemerintah untuk memberantasnya.

Berbagai cara telah dilakukan, baik melalui penambahan hukuman dan denda, maupun melalui KPK dengan menguak kasus korupsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi, hal-hal tersebut ternyata juga belum cukup untuk memberantas korupsi yang terus meningkat. Satu-satunya cara adalah menumbuhkan sikap kesadaran akan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab pemerintah maupun pejabat yang diberi wewenang dalam melaksanakan tugas agar tidak tergiur iming-iming uang yang banyak dari hasil korupsi.

Para pejabat dan pemerintah terkait seharusnya juga harus berusaha mengasah hati agar hatinya tidak menjadi tumpul. Karena sesungguhnya, hati yang tumpul berasal dari hati yang tidak pernah diasah dan tidak digunakan untuk melakukan tindakan baik. Selain itu, gerakan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini dan dilakukan dengan sebaik mungkin demi menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terbebas dari kasus korupsi.

Gerakan ini juga baik dilakukan pada kalangan muda maupun remaja yang sejatinya merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan memimpin bangsa ini. Gerakan anti korupsi ini seharusnya didukung

oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga dapat benar-benar menghasilkan pemerintahan yang bebas korupsi.

Jika uang negara terus dilahap oleh si tikus berdasi, maka lama kelamaan rakyat miskin akan mati. Mari kita bersama-sama bersatu menyatukan langkah, piker, dan hati, bersama membangun negeri, menjadi Indonesia yang anti korupsi.

E. Kesimpulan

Korupsi merupakan suatu tindakan menyelewengkan atau tidak menggunakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang dengan baik demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Kasus Sulaiman Sade ini menambah satu lagi citra buruk pejabat pemerintah di Indonesia.

Tindak korupsi Sulaiman Sade berdasarkan sudut pandang tindakan manusia:

1. Teori *actus hominis* dan *actus humanus* menyatakan bahwa koruptor tidak berbeda jauh dengan binatang karena tindak korupsi tidak mencerminkan adanya sifat manusiawi.
2. Azas tahu, mau, bebas menyatakan bahwa koruptor telah mengetahui akibat tindak korupsi dan tetap menghendaki tindak korupsi dengan *direct voluntary*/secara sadar, mereka disebut manusia bebas sehingga harus bertanggung jawab atas tindakannya, yaitu mengembalikan semua kerugian negara dan hukuman penjara.
3. Hati nurani tumpul yang dimiliki koruptor akibat adanya faktor materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Hati nuraninya tumpul karena tidak pernah menggunakan hati nuraninya untuk melakukan tindakan baik sehingga hatinya tidak peka terhadap nilai-nilai kebenaran.
4. Prinsip *Bonum communae bono privato praefferi* debet; sikap koruptor yang tidak berpegang teguh pada prinsip ini, dengan kata lain tidak mementingkan kepentingan bersama tetapi malah mengutamakan ego demi keuntungan dan memperkaya diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- TRIBUNNEWS.COM, “Kepala BPBD Samarinda Sulaiman Sade Ditahan, Diduga Terkait Korupsi Pembangunan Pasar Baqa”, 8 Oktober 2019, <<https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/08/kepala-bpbd-samarinda-sulaiman-sade-ditahan-diduga-terkait-korupsi-pembangunan-pasar-baqa>>, [diakses pada 20 November 2019]
- Kasus%20Korupsi%20Massal%20DPRD%20Kota%20Malang.pdf [diakses pada 20 November 2019]
- Dewantara, A. (2017). Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia).
- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *CIVIS*, 5(1/Januari).
- DEWANTARA, A. W. (2016). *GOTONG-ROYONG MENURUT SOEKARNO DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOGI MAX SCHELER, DAN SUMBANGANNYA BAGI NASIONALISME INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Dewantara, A. W. (2017). MULTIKULTURALISME INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA KONSEP MADANI NURCHOLISH MADJID DAN KONSEP CIVIL SOCIETY). *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 15-25.
- Dewantara, A. W. (2016). MEREFLEKSIKAN TUHAN DALAM PERSPEKTIF METAFISIKA, DAN RELEVANSINYA BAGI MULTIKULTURALISME INDONESIA. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 16(8), 3-18.